



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/501 TAHUN 2025
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2026 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PURWOREJO TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Purworejo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026, perlu dilakukan evaluasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, serta guna menguji kesesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Purworejo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727).

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Purworejo Nomor 100.3.2/12.398/2025 tanggal 28 November 2025 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang APBD Tahun Anggaran 2026;

2. Rapat Evaluasi oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo tanggal 17 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026 Dan Rancangan Peraturan Bupati Purworejo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Bupati Purworejo bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Purworejo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Dalam hal Bupati Purworejo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Purworejo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Bupati Purworejo, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Bupati Purworejo wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Desember 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Bupati Purworejo;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
10. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Hukum,



Sri Wahyuningsih, SH.
Pembina
NIP. 196910071994012001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/501 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2026 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
PURWOREJO TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN
ANGGARAN 2026

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2026 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
PURWOREJO TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2026

I. KEBIJAKAN UMUM

Pelaksanaan terhadap evaluasi APBD yaitu:

Terhadap dokumen Rancangan Peraturan Bupati Purworejo tentang Penjabaran APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026 dapat kami kemukakan bahwa dokumen yang disajikan belum sepenuhnya memenuhi keseluruhan Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Adapun informasi yang belum dicantumkan meliputi:

- A. Rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana; dan
- B. Formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Selanjutnya evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Purworejo tentang Penjabaran APBD terhadap:

- A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- B. Kepentingan umum;
- C. RKPD, KUA, dan PPAS; dan
- D. RPJMD.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI, KEPENTINGAN UMUM, RKPD, KUA, DAN PPAS, SERTA RPJMD

- A. Kesesuaian Tahapan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026
Kepatuhan atas landasan yuridis penyusunan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah termasuk kesesuaian tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Bupati Purworejo tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, dapat disajikan sebagai berikut:

No.	Uraian	Waktu	Ketentuan	Keterangan
1.	Kesepakatan bersama KUA-PPAS antara Bupati dan DPRD	6 Agustus 2025	Paling lambat minggu ke II bulan Agustus	Tepat Waktu
2.	Penyampaian Raperda tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD	3 September 2025	Paling lambat minggu ke II bulan September	Tepat Waktu
3.	Persetujuan bersama DPRD dan Bupati atas Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026	26 November 2025	Paling Lambat 30 November	Tepat Waktu
4.	Penyampaian Raperda tentang APBD dan Raperbup tentang Penjabaran APBD untuk dievaluasi oleh Gubernur	1 Desember 2025	3 hari setelah persetujuan bersama	Tepat Waktu

Sehubungan data tahapan proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, telah dilakukan penahapan mekanisme penyusunan APBD secara tepat waktu baik pada tahapan Kesepakatan Bersama KUA-PPAS, Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD, Persetujuan bersama DPRD dan Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk dievaluasi oleh Gubernur. Hal ini menandakan bahwa prinsip penyusunan APBD yang salah satunya didasarkan pada prinsip tepat waktu sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan telah sepenuhnya ditaati. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Purworejo agar tetap konsisten memperhatikan tahapan penyusunan APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan mendasarkan ketentuan perundangan-undangan.

B. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang APBD Tahun Anggaran 2026 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Berkenaan dengan rencana pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2026, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan dokumen KUA dan PPAS yang telah ditetapkan, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya:
 - a. Pajak Daerah sebesar Rp172.410.552.413,00; dan
 - b. Retribusi Daerah sebesar Rp367.634.702.104,00.

Sesuai ketentuan bahwa target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah dan menjadi bagian dalam proses penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS. Selanjutnya Keputusan Kepala Daerah atas target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud, dapat ditetapkan setelah mendapatkan evaluasi kesesuaian dari Gubernur.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Purworejo, agar dalam melakukan tahapan pembahasan APBD khususnya pada pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS sebelum ditetapkan Kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, harus tetap memenuhi ketentuan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Butir III.B.1.a.4).d) dan III.B.1.a.4).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025

2. Pada penganggaran target pendapatan daerah antara lain:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp585.545.557.679,00; dan
 - b. Pendapatan Transfer sebesar Rp1.852.668.489.000,00.

Dalam dokumen yang kami evaluasi belum sepenuhnya terdapat penjelasan landasan dan/atau dasar hukum pendapatan dimaksud. Sesuai butir IV.A.5.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Purworejo harus mencantumkan dasar hukum pendapatan dalam kolom Dasar Hukum pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan pada Rancangan Peraturan Bupati Purworejo tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

3. Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Purworejo menganggarkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang diuraikan sebagai berikut:
 - a. Dana Desa sebesar Rp317.030.772.000,00;
 - b. Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp23.199.778.000,00;
 - c. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.128.465.020.000,00; dan
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp296.940.415.000,00.

Alokasi penganggaran pendapatan transfer tersebut, belum sesuai dengan informasi resmi Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2026 Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-62/PK/2025 Tanggal 23 September 2025 Hal Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2026, khususnya pada pendapatan transfer Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp6.031.119.000,00. Ketidaksesuaian alokasi DBH dimaksud disebabkan Pemerintah Kabupaten Purworejo telah mengalokasikan pendanaan pendapatan transfer dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) sebesar Rp17.168.659.000,00.

Pemerintah Kabupaten Purworejo agar mengalokasikan Pendapatan Transfer sesuai dengan rekening berkenaan mengacu ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor No 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya apabila terdapat informasi resmi dari Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait alokasi DBH-CHT Tahun Anggaran 2026, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo agar menyesuaikan pada APBD Tahun Anggaran 2026 mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan butir III.B.2.a.1).a).(3).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tersebut.

Selanjutnya, berkaitan dengan pendapatan dana transfer yang sudah ditentukan penggunaannya antara lain:

- a. Penerimaan DBH Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Purworejo, dialokasikan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sebagaimana diatur dalam peraturan

- perundang-undangan mengenai cukai serta kegiatan lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai APBN, dengan ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan DBH-CHT memedomani Peraturan Menteri Keuangan mengenai Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana maksud butir III.B.2.a.1).a).(3).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.
- b. Penggunaan DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Kehutanan-DR ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan kegiatan pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir III.B.2.a.1).b).(1).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selain itu, dana transfer yang bersumber dari TKDD yang sudah ditentukan penggunaannya agar mengacu pada petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga apabila belum sesuai dapat dilakukan penyesuaian pada APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026 mengacu ketentuan.

C. Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Berkenaan dengan belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026 disampaikan sebagai berikut:

Kesesuaian alokasi penganggaran berkaitan dengan amanat peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum:

1. Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional.

Alokasi anggaran dalam rangka Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Purworejo terhadap Prioritas Pembangunan Nasional dianggarkan sebesar Rp2.501.080.046.679,00 atau 100,00% dari total belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri. sebesar Rp10.094.407.290,00 atau 0,40% dari total belanja daerah;
- b. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi. sebesar Rp139.651.205.533,00 atau 5,58% dari total belanja daerah;
- c. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air,

- Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru sebesar Rp38.696.712.814,00 atau 1,55% dari total belanja daerah;
- d. Membangun dari Desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan. sebesar Rp602.887.848.653,00 atau 24,11% dari total belanja daerah;
 - e. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM). sebesar Rp3.318.149.500,00 atau 0,13% dari total belanja daerah;
 - f. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas. sebesar Rp626.901.324.900,00 atau 25,07% dari total belanja daerah;
 - g. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur. sebesar Rp21.564.704.325,00 atau 0,86% dari total belanja daerah; dan
 - h. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyaludupan. sebesar Rp1.057.965.693.664,00 atau 42,30% dari total belanja daerah.

Sehubungan dengan sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Prioritas Kabupaten Purworejo yang telah mencapai 100,00%, diberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo yang telah memenuhi seluruh kontribusi sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Purworejo terhadap Program Prioritas Nasional.

Namun demikian, dalam rangka Percepatan Pembangunan Ekonomi Jawa Tengah sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019, belum terlihat secara jelas dukungan dimaksud dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Purworejo agar memberikan penjelasan atas dukungan penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan pada APBD Tahun Anggaran 2026, serta mengawal pelaksanaannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

- 2. Alokasi anggaran dalam rangka menunjang kebijakan prioritas daerah Kabupaten Purworejo dan pencapaian prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

Berkenaan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Purworejo dengan tema “Penguatan Potensi Lokal sebagai Daerah Penumpu Ketahanan Pangan”, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Penguatan kapasitas pelaku ekonomi lokal serta pengelolaan potensi unggulan berbasis sumber daya lokal dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
- b. Peningkatan pemanfaatan sumber daya lokal dan pengelolaan lingkungan hidup duarahan untuk mendukung keberlanjutan sistem pangan yang adaptif dan ramah lingkungan.
- c. Pemetaan menyeluruh atas kebutuhan dan kondisi infrastruktur wilayah, diiringi dengan peningkatan kualitas serta keterjangkauan infrastruktur dasar guna mendukung konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah, khusunya dalam distribusi hasil pertanian dan komoditas unggulan.
- d. Penguatan fondasi layanan dasar melalui optimalisasi sumber daya di sektor pendidikan dan kesehatan dijalankan secara inklusif,

bersamaan dengan penguatan nilai-nilai keagamaan, budaya lokal, dan kohesi sosial masyarakat.

- e. Penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan dan desa difokuskan pada pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan dasar, yang mendukung proses perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan berbasis data lokal, terutama dalam mendukung pengembangan potensi unggulan dan ketahanan pangan daerah.

Berdasarkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026 yang telah disampaikan, sudah terlihat dokumen yang bisa menggambarkan dukungan atau sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Purworejo terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2026. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Purworejo diharapkan dapat konsisten mengarahkan program/kegiatan pada APBD sesuai dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat menunjang pencapaian sasaran dan target Pembangunan Jawa Tengah yang telah ditetapkan, diantaranya untuk tahun 2026 yang meliputi:

- a. Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas, dengan sasaran prioritas daerah:
 - 1) Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00%-5,80%;
 - 2) Inflasi sebesar 3,0% +/- 1 %;
 - 3) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,47%-4,37%; dan
 - 4) Nilai Tukar Petani sebesar 107,68.
- b. Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata, dengan sasaran prioritas daerah :
 - 1) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 74,55;
 - 2) Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 62,76;
 - 3) Indeks Pembangunan Gender sebesar 93,34; dan
 - 4) Indeks Pembangunan Keluarga sebesar 65,38.
- c. Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan sasaran prioritas daerah:
 - 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 75,73; dan
 - 2) Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana sebesar 4,00%.
- d. Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif, dengan sasaran prioritas daerah Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 84,00.

Selanjutnya menyusun dokumen sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026.

3. Pendanaan dalam rangka pemenuhan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana amanat Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
 - a. Alokasi Anggaran untuk Fungsi Pendidikan
Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp1.211.002.053.347,00 atau 48,42% dari total belanja daerah sebesar Rp2.501.080.046.679,00. Pemerintah Kabupaten Purworejo telah memenuhi ketentuan penganggaran untuk fungsi pendidikan yaitu sekurang-kurangnya 20% dari total belanja daerah sesuai dengan amanat Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Purworejo agar terus mempertahankan konsistensi dalam pengalokasian anggaran fungsi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.

b. Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Pemerintah Kabupaten Purworejo berdasarkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026, telah mengalokasikan Belanja Infrastruktur Daerah sebesar Rp671.419.129.379,00 atau 33,83% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp1.984.410.102.277,00. Sesuai ketentuan bahwa Pemerintah Kabupaten Purworejo harus mengalokasikan sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp793.764.040.910,80. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Purworejo agar mempertimbangkan proporsi belanja infrastruktur daerah dimaksud pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026 atau secara bertahap memenuhi ketentuan proporsi dimaksud dalam APBD dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atau paling lambat Tahun 2027.

c. Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dialokasikan Forum Kerukunan Umat Beragama sebesar Rp252.000.000,00 atau 0,01% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam Belanja Hibah kepada FKUB, telah memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran FKUB dalam APBD. Namun demikian, kedepan anggaran tersebut diharapkan dapat lebih ditingkatkan sehingga cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Purworejo.

d. Anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN.

Pemerintah Kabupaten Purworejo telah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp1.771.634.780,00 atau 0,07% dari total belanja daerahbelanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, diantaranya tercantum pada:

- 1) Program Kepegawaian Daerah, pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, sebesar Rp328.045.000,00;
- 2) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, pada:
 - a) Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis, sebesar Rp1.102.123.500,00; dan
 - b) Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, sebesar Rp341.466.280,00.

Pemerintah Kabupaten/Kota harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi

Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Alokasi anggaran tersebut diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang dibidang pendidikan dan pelatihan dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi.

Berdasarkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang telah disampaikan, Pemerintah Kabupaten Purworejo belum memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah tersebut. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Purworejo harus melakukan perhitungan kembali atas kebijakan alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN memedomani ketentuan dimaksud, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian pada Rancangan Peraturan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana ditegaskan dalam butir V.B.8.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Apabila disandingkan dengan penyediaan anggaran pada tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, telah dialokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah pada Program Kepegawaian Daerah, pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan total sebesar Rp1.503.716.950,00 atau 0,13% dari total belanja daerah dalam Perubahan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025. Sehingga dapat dikemukakan bahwa alokasi pada Tahun 2026 meningkat sebesar Rp267.917.830,00 atau 17,82% dibandingkan Tahun 2025.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Purworejo harus tetap konsisten dalam memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud pada Tahun 2026 sebagaimana ditegaskan dalam butir V.B.8.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

e. Alokasi Anggaran Pengawasan

Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah mengalokasikan anggaran pengawasan tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada Inspektorat sebesar Rp5.013.377.100,00 atau 0,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa Pemerintah Kabupaten Purworejo belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Purworejo paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sesuai ketentuan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Purworejo agar memenuhi penyediaan anggaran dimaksud pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Selanjutnya menindaklanjuti Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Nomor B/4435/KSP.00/70-73/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 hal Penyampaian Surat Edaran Bersama Tentang Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah, dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Kepala Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : 11 tahun 2024, Nomor : 700.1/3013/SJ, Nomor : HK.01.00/SE.3/K/D3/2024 Tentang Penguanat Aparat Pengawas Internal Pemerintah, yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penguatan aspek pengawasan, diantaranya:

- a. Penguatan Aspek Anggaran Pengawasan;
- b. Penguatan Aspek Sumber Daya Manusia;
- c. Penguatan Aspek Independensi dan Objektivitas; dan
- d. Penguatan Aspek Peran dan Layanan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo agar melaksanakan kebijakan penguatan aspek pengawasan di Kabupaten Purworejo sesuai amanat surat edaran bersama dimaksud.

4. Alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berkenaan dengan pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pendidikan sebesar Rp31.426.767.940,00 atau 4,54% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp692.301.248.328,00. Harus diprioritaskan dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Pendidikan dengan memedomani Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirincikan secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah masing-masing Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah terhadap pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

b. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Kesehatan sebesar Rp4.306.323.100,00 atau 0,67% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan Daerah, Rumah Sakit dan UPT Puskesmas sebesar Rp643.421.997.356,00. Harus diprioritaskan dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Kesehatan dengan memedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.857.400.400,00 atau 1,35% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp137.292.265.858,00. Harus diprioritaskan untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp8.889.100,00 atau 0,12% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp7.216.556.205,00. Harus diprioritaskan dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan memedomani Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023.

e. SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp3.192.455.414,00 atau 15,26% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp20.926.465.880,00. Harus diprioritaskan dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan memedomani ketentuan:

- 1) bidang urusan bencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) bidang urusan kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; dan
- 3) bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

f. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Sosial sebesar Rp313.567.500,00 atau 4,05% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebesar Rp7.741.460.617,00. Harus diprioritaskan dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Sosial dengan memedomani Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota.

5. Alokasi Belanja Tunjangan kepada DPRD, khususnya pada:

- a. Belanja Tunjangan Perumahan DPRD sebesar Rp6.720.720.000,00; dan
 - b. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp6.445.200.000,00.
- Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Purworejo harus tetap memastikan diantaranya bahwa:
- a. Kebijakan pemberian tunjangan perumahan dan transportasi, tidak dapat diberikan secara bersamaan dengan penyediaan rumah negara dan perlengkapannya, serta kendaraan dinas jabatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - b. Besaran tunjangan perumahan dan transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang

- berlaku serta standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Purworejo harus memastikan bahwa kebijakan pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 15, pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD.

6. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp1.784.431.075.841,00 atau 71,35% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat untuk jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Berkenaan dengan alokasi Belanja Operasi dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Purworejo telah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) sebesar Rp797.531.680.585,00 atau 31,89% dari total Belanja Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan amanat butir III.C.1.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025, bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Dalam butir tersebut pula dijelaskan bahwa dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai yang dialokasikan melalui TKD paling lambat pada Tahun Anggaran 2027 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Purworejo agar mengambil langkah strategis dalam menentukan kebijakan pengurangan alokasi belanja pegawai dengan mempertimbangkan kewajiban mengalokasikan porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% dari total belanja APBD di Tahun Anggaran 2027.
- b. Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp666.805.624.672,42 atau 26,66% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026, agar dianggarkan dengan memperhitungkan kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan pengangkatan Calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) sesuai formasi pegawai tahun 2026 dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir III.C.1.a.1).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selanjutnya penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN dimaksud agar dihitung sesuai kebutuhan masing-masing perangkat daerah guna menjamin pemenuhannya dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026.

- c. Penyediaan anggaran Tambahan Penghasilan ASN yang tercantum pada Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp273.526.383.192,58 atau 10,94% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026 dengan mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi daerah, kelas jabatan dan kemampuan keuangan daerah dengan memedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan ketentuan butir III.C.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selanjutnya, dalam rangka penetapan besaran TPP bagi ASN Pemerintah Kabupaten Purworejo harus menggunakan perhitungan *basic* TPP ASN berdasarkan indeks tahun 2024 atau tahun sebelumnya yang masih berlaku yang meliputi kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi, dan/atau indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah, termasuk melakukan kebijakan integrasi dan memformulasikan pemberian insentif, lembur, honorarium, kompensasi lainnya dan/atau bagian apapun yang diterima ASN berupa insentif pemungutan pajak dan retribusi, jasa pelayanan dan TPG, TKG, Tamsil Guru yang bersumber dari DAK Non Fisik sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterima ASN ke formula TPP ASN sebagaimana ditegaskan dalam butir III.C.1.a.2).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

- d. Penyediaan anggaran pada Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp27.153.163.702,00 yang merupakan hak keuangan dan administratif DPRD, yang diuraikan pada:
- 1) Belanja Uang Representasi DPRD sebesar Rp1.004.010.000,00;
 - 2) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebesar Rp87.876.600,00;
 - 3) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebesar Rp122.679.480,00;
 - 4) Belanja Uang Paket DPRD sebesar Rp86.058.000,00;
 - 5) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar Rp1.455.814.500,00;
 - 6) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebesar Rp131.544.000,00;
 - 7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebesar Rp22.500.000,00;
 - 8) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp7.938.000.000,00;
 - 9) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp1.984.500.000,00;
 - 10) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp6.807.771.804,00;
 - 11) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp6.445.200.000,00; dan
 - 12) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebesar Rp610.000.000,00.

Dianggarkan dengan memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Purworejo yang mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah memedomani Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas,

efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

- e. Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp731.040.022.659,00 atau 29,23% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026. Alokasi belanja barang dan jasa dimaksud harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- f. Penyediaan anggaran belanja antara lain untuk:
 - 1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebesar Rp5.917.400.000,00; dan
 - 2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp848.700.000,00.

Agar alokasi dan besaran penyediaan anggaran dimaksud, dianggarkan sesuai Standar Satuan Harga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah memedomani ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Selanjutnya tambahan penganggaran honorarium tersebut agar tetap memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

- g. Pengalokasian anggaran guna memenuhi kebutuhan Non ASN di Pemerintah Kabupaten Purworejo antara lain pada:
 - 1) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan sebesar Rp1.054.745.000,00;
 - 2) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebesar Rp54.506.000,00;
 - 3) Belanja Jasa Tenaga Laboratorium sebesar Rp717.697.100,00;
 - 4) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum sebesar Rp8.320.000,00;
 - 5) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial sebesar Rp6.429.084.400,00;
 - 6) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan sebesar Rp496.652.000,00;
 - 7) Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan sebesar Rp20.950.000,00;
 - 8) Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan sebesar Rp238.575.900,00;
 - 9) Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp722.817.200,00;
 - 10) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebesar Rp3.888.048.879,00;
 - 11) Belanja Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp5.307.954.480,00;
 - 12) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebesar Rp6.920.920.202,00;
 - 13) Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebesar Rp4.183.616.500,00;
 - 14) Belanja Jasa Tenaga Supir sebesar Rp596.605.200,00; dan
 - 15) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi sebesar Rp267.936.000,00.

Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD agar memperhatikan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menegaskan bahwa adanya Larangan Pemerintah Daerah untuk

mengangkat Pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya agar menjadi perhatian bahwa penyediaan pegawai diprioritaskan pada pemenuhan melalui *recruitment* ASN, baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan kebutuhan riil berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) Perangkat Daerah.

Selanjutnya berkaitan dengan angka 5) di atas, apabila disandingkan dengan usulan pembiayaan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025, dapat dikemukakan bahwa Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial, pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp6.429.084.400,00 meningkat Rp4.735.528.400,00 atau 279,62% dari anggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.693.556.000,00;

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Purworejo harus melakukan perhitungan secara cermat atas kebutuhan pembiayaan dimaksud dengan mempertimbangkan jumlah Non ASN saat ini, kriteria pemberiannya mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/227/SJ tanggal 16 Januari 2025 Hal Penganggaran Gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu serta Dasar Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur.

h. Penyediaan anggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diuraikan antara lain pada:

- 1) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN yang merupakan Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, secara agregat sebesar Rp7.096.922.831,90;
- 2) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp1.601.182.771,00; dan
- 3) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebesar Rp104.461.010,00.

agar dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan butir III.C.1.a.2).f).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Selanjutnya, pemberian kepada penerima insentif dimaksud mengacu pada ketentuan Pasal 104 dan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- i. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja, Pemerintah Kabupaten Purworejo harus mengambil langkah kebijakan agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Berdasarkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah mengalokasikan anggaran, diantaranya :
 - 1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp5.911.067.000,00;
 - 2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp327.231.000,00;

- 3) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN sebesar Rp25.680.000,00; dan
- 4) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebesar Rp35.178.000,00.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Purworejo agar dalam memenuhi alokasi anggaran dimaksud tetap mengacu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dan memperhatikan kebijakan penganggaran:

- 1) jenis program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan bagi PPU, PBPU, pekerja sektor jasa konstruksi dan Pekerja Migran Indonesia (PMI); dan
- 2) besaran iuran minimal program BPJS Ketenagakerjaan untuk PPU, PBPU, pekerja jasa konstruksi dan PMI sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015, besaran iuran minimal untuk PPU:
 - (a) JKK sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari Upah Minimum Provinsi/Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMP/UMK) dan JKM 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari UMP/UMK; dan
 - (b) JHT 5,70% (lima koma tujuh puluh persen) dari UMP/UMK, jaminan pensiun 3,00% (tiga persen) dari UMP/UMK dengan pembagian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah mendorong capaian *Universal Coverage* (cakupan kepesertaan) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sampai dengan Tahun 2029 sebesar 43,92% sesuai target dalam RPJMN 2025-2029 dan perluasan cakupan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja/buruh yang tergolong masyarakat miskin dan miskin ekstrem sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.

- j. Penyediaan anggaran yang digunakan dalam rangka penjaminan penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat di Kabupaten Purworejo pada:
- 1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp75.383.543.032,00; dan
 - 2) Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp1.680.000.000,00.

penganggaran atas kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan dengan berpedoman pada Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan. Untuk Itu, Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam menjamin kebijakan *Universal Health Coverage* (UHC) sebesar 98,7% dari total penduduk pada tahun 2026 di wilayah Kabupaten Purworejo harus mengacu ketentuan tersebut.

- k. Penyediaan belanja pemeliharaan sebesar Rp38.750.265.529,00 atau 1,55% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang APBD Tahun Anggaran 2026, antara lain diuraikan dalam:

- 1) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp11.784.192.929,00;
- 2) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp7.198.060.900,00;
- 3) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp19.725.732.500,00; dan
- 4) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp42.279.200,00.

yang merupakan alokasi anggaran dalam rangka pemeliharaan barang milik daerah, harus berpedoman pada dokumen Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Purworejo agar memenuhi kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas dalam rangka pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana butir III.C.1.b.3).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

1. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp1.266.226.600,00, agar penganggarannya mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan. Namun demikian, dapat dianggarkan jasa konsultansi konstruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya diakui sebagai Konstruksi Dalam Penggeraan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan masa manfaat hasil dari konsultansi dimaksud.

m. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp3.823.227.500,00, yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan sebesar Rp3.427.253.500,00;
- 2) Belanja Diklat Kepemimpinan sebesar Rp395.974.000,00;
- 3) Belanja Sosialisasi tidak dianggarkan; dan
- 4) Belanja Bimbingan tidak dianggarkan.

dalam pelaksanaannya agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, serta diprioritaskan untuk diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten Purworejo. Dalam hal pelaksanaannya diselenggarakan di luar daerah Kabupaten Purworejo, agar dilakukan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya.

n. Penyediaan alokasi Belanja Hibah sebesar Rp78.923.147.797,00 atau 3,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026, dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (94) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir III.C.1.b.9) dan III.C.1.b.10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus menjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.

Selanjutnya berkenaan dengan penganggaran belanja hibah diberikan dalam bentuk barang yang merupakan pembangunan bangunan ruang kelas yang bersifat konstruksi, terdapat kebijakan penganggaran tersebut pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 berupa belanja hibah berupa barang/jasa kepada MI NU BLIMBING, MI IMAM PURO, SD KUB MUHAMMADIYAH PURWOREJO, dan MI ISLAMIYAH WARENG dengan rincian Pembangunan Ruang Kelas Baru dengan total sebesar Rp450.000.000,00.

Berkaitan perencanaan belanja hibah dalam bentuk barang berupa pembangunan bangunan ruang kelas yang bersifat konstruksi dimaksud, Pemerintah Kabupaten Purworejo harus memperhatikan:

- 1) dianggarkan dalam APBD mengikuti konsep *full costing* atau nilai barang yang dianggarkan dalam belanja hibah dalam bentuk barang sebesar harga perolehan/beli/bangun aset ditambah seluruh komponen biaya pembangunan gedung negara berupa

belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan;

- 2) komponen biaya pembangunan bangunan yang menjadi satu kesatuan penganggaran belanja hibah barang meliputi:
 - a) biaya pelaksanaan konstruksi;
 - b) biaya perencanaan teknis;
 - c) biaya pengawasan teknis; dan
 - d) biaya pengelolaan kegiatan.
- 3) biaya sebagaimana dimaksud angka 2) diatas, dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi bangunan gedung dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Belanja Modal

- a. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis Belanja Modal Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp184.678.926.457,00 atau 7,38% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026 harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b. Penyediaan anggaran Belanja Modal yang tercantum pada:
 - 1) Belanja Modal Tanah sebesar Rp5.067.705.600,00 atau 0,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026;
 - 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp40.039.719.743,00 atau 1,60% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026;
 - 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp36.554.414.240,00 atau 1,46% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026;
 - 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp94.823.607.174,00 atau 3,79% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026;
 - 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp8.111.271.700,00 atau 0,32% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026; dan
 - 6) Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp82.208.000,00 atau 0,00% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026.

Berkenaan dengan penganggaran Belanja Modal tersebut, kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo agar:

- 1) Belanja Modal hanya dianggarkan dalam rangka pemenuhan pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Purworejo, sebagaimana maksud Pasal 282 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;

- 2) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efektif, efisien, transparan dan terbuka, bersaing, adil, serta akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada;
- 3) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.
- 4) Sebagai tindaklanjut rekomendasi KPK terhadap tata kelola BMD serta untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan pada area pengelolaan BMD, Pemerintah Kabupaten Purworejo agar memastikan alokasi dukungan anggaran untuk:
 - a) sertifikasi atas BMD berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah guna mencapai target sertifikasi tanah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 028/9253/SJ tanggal 10 September 2019 hal Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
 - b) penertiban aset berupa prasarana, sarana, dan utilitas yang harus diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di daerah; dan
 - c) melaksanakan Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP) secara partisipatif bekerja sama dengan Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
- 5) Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor listrik Berbasis Baterai (*battery electric vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional Dan/Atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diminta untuk:
 - a) menyusun dan menetapkan Perkada dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah;
 - b) meningkatkan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas

operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah melalui pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) dan/atau program konversi kendaraan bermotor bakar menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*);

- c) mendorong BUMD untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*);
- d) melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap satuan kerja perangkat daerah untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah di daerah masing-masing; dan
- e) memberikan Dana Insentif Fiskal dan Non Fiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo agar melakukan identifikasi dan langkah-langkah percepatan khususnya berkaitan dengan penyiapan payung hukum (*legal standing*) dan perhitungan kebutuhan kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo termasuk di dalamnya sarana prasarana penunjang lainnya dalam rangka implementasi kebijakan Pemerintah Pusat melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 dimaksud. Selanjutnya kebutuhan alokasi anggaran tersebut agar dipertimbangkan untuk secara bertahap dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026.

8. Belanja Tidak Terduga

Pemerintah Kabupaten Purworejo mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp15.300.099.979,00 atau 0,61% dari total belanja daerah pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026. Secara substansi, alokasi BTT digunakan untuk mengantisipasi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sesuai ketentuan sebagaimana maksud butir III.C.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selanjutnya, penganggaran BTT harus memperhatikan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang berisi nilai indeks risiko bencana dan capaian penurunan indeks risiko bencana di tingkat Kabupaten/Kota dan Tingkat Provinsi seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam menganggarkan alokasi BTT harus memperhitungkan secara cermat berkaitan kebutuhan riil Pemerintah Daerah, termasuk kebijakan mitigasi, pra dan pasca bencana sesuai IRBI dimaksud dan kebutuhan penyelenggaraan tanggap darurat sesuai kewenangannya dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD TA 2026 secara memadai dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan ancaman bencana prioritas daerah dan pascabencana.

pemerintah daerah meningkatkan dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pra Bencana dan Pasca Bencana. Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026, telah dialokasikan anggaran guna menunjang kebijakan kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Purworejo, antara lain :

- a. Program Penanggulangan Bencana sebesar Rp2.122.162.314,00; dan
- b. Program Penanganan Bencana sebesar Rp172.079.200,00.

Pemerintah Kabupaten Purworejo agar melakukan perhitungan kembali terhadap pemenuhan pembiayaan dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan ancaman bencana prioritas daerah dan pascabencana dimaksud, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026 sebagaimana diamanatkan dalam butir III.C.3.n. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

10. Dalam rangka upaya percepatan penanggulangan *stunting* di Daerah, Pemerintah Kabupaten Purworejo harus memedomani Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* khususnya pada pilar 1 dan pilar 3 dalam strategi nasional percepatan penurunan *stunting* terkait integrasi perencanaan dan penganggaran di daerah serta peningkatan dukungan anggaran percepatan penurunan *stunting* pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui pemetaan dengan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta pemutakhirannya dengan memperhatikan kebijakan percepatan penanggulangan *stunting* berdasarkan lokasi prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Purworejo menganggarkan alokasi anggaran *stunting* melalui Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) pada Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang diuraikan pada Sub Kegiatan:

- a. Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko *Stunting* (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) sebesar Rp0,00; dan
- b. Pendampingan Keluarga Berisiko *Stunting* (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) sebesar Rp3.913.800.000,00.

Selanjutnya, pemetaan atas perhitungan alokasi anggaran *stunting* dimaksud agar dilaporkan mengacu Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8476/SJ tanggal 27 November 2022 Hal hasil Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.

11. Belanja Transfer

- a. Berdasarkan dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah mengalokasikan anggaran belanja bagi hasil, meliputi:
 - 1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp17.523.011.204,00 atau 10,16% dari total target pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp172.410.552.413,00; dan
 - 2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp3.104.089.000,00 atau 0,79% dari total target pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp392.304.643.551,00.

Pemerintah Kabupaten/Kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit

10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2026 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Purworejo harus melakukan perhitungan kembali terkait kewajiban belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa memedomani ketentuan tersebut dengan tetap memperhatikan regulasi terkait lainnya, selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan Lampiran VI dokumen Rancangan Peraturan Bupati Purworejo tentang Penjabaran APBD Tahun Kabupaten Purworejo Anggaran 2026, belum diuraikan secara jelas nama dan alamat penerima bagi hasil Kabupaten/Kota kepada pemerintah desa dimaksud. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Purworejo agar melakukan identifikasi dengan memedomani ketentuan yang berlaku untuk selanjutnya dicantumkan dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

- b. Berkenaan dengan belanja Bantuan Keuangan, telah dialokasikan pada dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang merupakan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp496.042.844.198,00..

Dalam pengalokasian belanja bantuan keuangan, Pemerintah Kabupaten Purworejo harus memperhatikan:

- 1) Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain seperti keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Berdasarkan Lampiran Vb dokumen rancangan Peraturan Bupati Purworejo tentang Penjabaran APBD Tahun Kabupaten Purworejo Anggaran 2026, belum diuraikan secara jelas nama dan Alamat penerima bantuan keuangan dimaksud. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Purworejo agar melakukan identifikasi kembali dengan memedomani Peraturan Kepala Daerah terkait bantuan keuangan di Kabupaten Purworejo, selanjutnya dicantumkan dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Lampiran pendukung lainnya.

Pemerintah Kabupaten Purworejo juga harus memperhatikan kebijakan penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DAU dan DBH yang dianggarkan kabupaten/kota dalam APBD atau perubahan APBD TA berjalan yang diterima oleh kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

12. Berkaitan dengan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, telah ditetapkan kebijakan:

- a. Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- b. untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, alokasi anggaran paling sedikit 5% (lima persen) dari APBD dihitung dari pendapatan setelah dikurangi DAK, ditambah DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. untuk daerah kabupaten yang memiliki kelurahan dan kota yang memiliki desa, menganggarkan paling sedikit sebesar DD terendah yang diterima desa di kabupaten/kota, ditambah DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. penggunaan untuk pembangunan sarana prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri mengenai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Berdasarkan dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah mengalokasikan belanja untuk kegiatan kelurahan tersebut diatas, antara lain:

- a. Kelurahan Purworejo
 - 1. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp481.000.000,00; dan
 - 2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dianggarkan sebesar Rp434.580.200,00.
- b. Kelurahan Panggenrejo
 - 1. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp442.000.000,00; dan
 - 2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dianggarkan sebesar Rp199.836.000,00.
- c. Kelurahan Kedungsari
 - 1. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp491.000.000,00; dan
 - 2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dianggarkan sebesar Rp133.250.700,00.
- d. Kelurahan Cangkrep Kidul
 - 1. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp556.296.400,00; dan
 - 2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dianggarkan sebesar Rp110.898.500,00.
- e. Kelurahan Cangkrep Lor
 - 1. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp510.000.000,00; dan
 - 2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dianggarkan sebesar Rp183.700.000,00.
- f. Kelurahan Tambakrejo
 - 1. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp475.000.000,00; dan

2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dianggarkan sebesar Rp216.934.600,00.
- g. Kelurahan Pangen Jurutengah
 1. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp381.582.100,00; dan
 2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dianggarkan sebesar Rp178.417.600,00.
- h. Kelurahan Doplang
 1. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp443.000.000,00; dan
 2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dianggarkan sebesar Rp182.739.600,00.
- i. Kelurahan Sindurjan
 1. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp370.000.000,00; dan
 2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dianggarkan sebesar Rp241.700.000,00.
- j. Kelurahan Paduroso
 1. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp414.000.000,00; dan
 2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dianggarkan sebesar Rp146.000.000,00.
- k. Kelurahan Mranti
 1. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp457.000.000,00; dan
 2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dianggarkan sebesar Rp133.000.000,00.
- l. Kelurahan Mudal
 1. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp482.462.000,00; dan
 2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dianggarkan sebesar Rp80.042.800,00.
- m. Kelurahan Keseneng
 1. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp487.640.000,00; dan
 2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dianggarkan sebesar Rp72.360.000,00.
- n. Kelurahan Baledono
 1. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp568.247.900,00; dan
 2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dianggarkan sebesar Rp302.405.700,00.
- o. Kelurahan Kledung Karangdalem
 1. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp636.154.900,00; dan
 2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dianggarkan sebesar Rp128.200.000,00.
- p. Kelurahan Kledungkradenan
 1. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp475.688.300,00; dan
 2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dianggarkan sebesar Rp175.000.000,00.

- q. Kelurahan Borokulon
 1. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp506.382.600,00; dan
 2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00.
- r. Kelurahan Sucen Jurutengah
 1. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp420.000.000,00; dan
 2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dianggarkan sebesar Rp140.247.500,00.
- s. Kelurahan Kutoarjo
 1. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp401.868.091,00; dan
 2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dianggarkan sebesar Rp396.211.300,00.
- t. Kelurahan Semawung Kembaran
 1. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp505.475.700,00; dan
 2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dianggarkan sebesar Rp137.735.500,00.
- u. Kelurahan Bayem
 1. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp528.543.000,00; dan
 2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dianggarkan sebesar Rp132.938.500,00.
- v. Kelurahan Katerban
 1. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp563.050.000,00; dan
 2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dianggarkan sebesar Rp155.251.400,00.
- w. Kelurahan Bandung
 1. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp487.558.650,00; dan
 2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dianggarkan sebesar Rp171.955.000,00.
- x. Kelurahan Semawung Daleman
 1. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp495.715.850,00; dan
 2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dianggarkan sebesar Rp172.475.100,00.
- y. Kelurahan Lugosobo
 1. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp428.955.000,00; dan
 2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dianggarkan sebesar Rp129.840.000,00.

Sehubungan dengan hal tersebut belum terlihat adanya kebijakan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan di Kabupaten Purworejo. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Purworejo agar memberikan penjelasan dan memastikan bahwa alokasi dimaksud telah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, untuk selanjutnya tetap memberikan supervisi/pendampingan melalui Kecamatan di wilayahnya guna menjamin ketercapaian target kinerja kegiatan yang telah ditetapkan.

13. Dalam rangka mewujudkan visi Gubernur “Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju Yang Berkelaanjutan Untuk Menuju Indonesia Emas 2045” melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat, sesuai Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.10.2/0004464 Tahun 2025 tentang Kecamatan Berdaya, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah diminta untuk mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, pengembangan potensi lokal dengan melibatkan kelompok *zillenial*, dan memberikan perhatian lebih pada perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan, serta mendorong pemanfaatan optimal sarana olah raga atau *sport center* melalui program Kecamatan Berdaya.

Selanjutnya, dengan ditetapkannya prioritas lokasi Kecamatan Berdaya untuk Kabupaten Purworejo oleh Gubernur Jawa Tengah sebagaimana Surat Sekretaris Daerah a.n. Gubernur Jawa Tengah Nomor B/400.10.2/197/2025 tanggal 3 Juli 2025 Hal Penetapan Lokasi Kecamatan Berdaya, yang antara lain:

- a. Kecamatan Purworejo;
- b. Kecamatan Butuh;
- c. Kecamatan Kaligesing; dan
- d. Kecamatan Ngombol.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo agar mengambil langkah strategis dalam mendukung pencapaian visi Gubernur Jawa Tengah dimaksud melalui program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah terkait dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

14. Menindaklanjuti ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar:

- a. melakukan koordinasi dengan Gubernur dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- b. menugaskan SKPD yang melaksanakan urusan dibidang koperasi untuk mengoordinasikan pembentukan melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan melibatkan SKPD terkait;
- c. menugaskan SKPD yang melaksanakan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat desa bersama dengan SKPD yang yang melaksanakan urusan dibidang koperasi untuk memfasilitasi dan mendampingi pemerintah desa dan BPD bersama unsur Masyarakat dengan melibatkan SKPD terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa;
- d. menganggarkan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- e. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
- f. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa melalui Camat dalam pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo agar memberikan penjelasan secara memadai terkait dukungan terhadap kebijakan Pemerintah yang tercantum dalam regulasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dimaksud pada dokumen perencanaan dan penganggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2025.

D. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya. Berkaitan dengan Kebijakan alokasi Pembiayaan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026 dapat disampaikan bahwa:

1. Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026 dianggarkan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp65.616.000.000,00 yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Secara persentase sebesar 2,62% dari total belanja daerah sebesar Rp2.501.080.046.679,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Purworejo harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional atas proyeksi SiLPA tersebut dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai pada Tahun Anggaran 2026 akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai maksud butir III.D.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.
2. Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026 dianggarkan pengeluaran pembiayaan yang merupakan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp2.750.000.000,00. Pemerintah Kabupaten Purworejo dapat menganggarkan penyertaan modal pada BUMD dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026 mendasarkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, dengan terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah dan analisis penyertaan modal Daerah sebelum disetujui oleh Kepala Daerah. Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 dan butir III.D.2.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS

1. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026 dengan RKPD Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026 telah melakukan tahapan perencanaan dan penganggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026 sesuai amanat Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Kesesuaian dokumen RKPD, KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026
- Pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA)-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) Tahun Anggaran 2026 dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	URAIAN	RKPD (Rp)	KUA-PPAS (Rp)	RAPERDA APBD (Rp)
1.	Pendapatan	2.451.619.713.176	2.452.360.927.728	2.438.214.046.679
2.	Belanja	2.514.485.713.176	2.515.226.927.728	2.501.080.046.679
3.	Surplus/(Defisit)	(62.866.000.000)	(62.866.000.000)	(62.866.000.000)
4.	Pembentukan Neto	62.866.000.000	62.866.000.000	62.866.000.000
5.	SILPA	0	0	0

Sehubungan data tersebut di atas, terdapat perbedaan pengalokasian anggaran yang signifikan pada struktur pendapatan dan belanja dalam RKPD dan KUA-PPAS dengan Raperda APBD. Sesuai dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026 dan dokumen pendukung lainnya yang telah disampaikan dalam rangka evaluasi, belum dapat menjelaskan penyebab perbedaan anggaran tersebut. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Purworejo agar dapat memberikan penjelasan secara umum perbedaan penganggaran dimaksud. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Purworejo harus selalu mengupayakan kesesuaian pada setiap tahapan penyusunan APBD, mulai dari perencanaan hingga penganggaran.

3. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah, KUA-PPAS dengan RKPD

Berkaitan dengan pelaksanaan program pada beberapa perangkat daerah, terdapat perubahan perencanaan anggaran antara dokumen RKPD, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026 sebagaimana terlampir pada dokumen Lampiran VIII Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026, antara lain:

a. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp4.596.519.600,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp7.324.266.000,00;
- 2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp131.206.000,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp475.363.540,00;
- 3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp52.613.130.079,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp51.603.700.000,00;

- 4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp1.182.845.500,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp3.237.845.500,00;
- 5) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp926.157.500,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp718.229.500,00;
- 6) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp1.550.000.000,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp1.700.000.000,00;
- 7) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp1.240.701.800,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp2.181.313.400,00;
- 8) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp30.275.645.000,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp29.137.000.000,00;
- 9) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp11.500.532.000,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp11.078.700.000,00;
- 10) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp645.000.000,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp445.000.000,00;
- 11) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp1.793.548.500,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp2.135.248.500,00; dan
- 12) Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp3.652.498.950,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp1.513.509.100,00.

b. Dinas Kesehatan Daerah

- 1) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengembangan Puskesmas, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp5.266.622.060,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp5.672.060,00;
- 2) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp6.030.732.770,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp953.344.870,00;
- 3) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp14.151.475.351,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp15.386.803.351,00;

- 4) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp86.140.000,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp299.906.952,00; dan
 - 5) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp56.081.156.751,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp80.854.699.783,00.
- c. Upt Puskesmas Kemiri
- Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp123.580.000,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp13.154.300,00.
- d. Upt Puskesmas Mranti
- Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp144.967.800,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp34.542.100,00.
- e. Upt Puskesmas Cangkrep
- Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp153.780.000,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp43.354.300,00.
- f. Upt Puskesmas Purworejo
- Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp117.022.200,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp6.596.500,00.
- g. Upt Puskesmas Gebang
- Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp138.388.000,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp27.962.300,00.
- h. Upt Puskesmas Bayan
- Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp200.197.000,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp89.771.300,00.
- i. Upt Puskesmas Seborokrakyak
- Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp187.745.000,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp77.019.300,00.
- j. Upt Puskesmas Bagelen

Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp280.704.000,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp170.278.300,00.

k. Upt Puskesmas Kutoarjo

Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp121.607.000,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp11.181.300,00.

l. Upt Puskesmas Pituruh

Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp244.899.450,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp134.473.750,00.

m. Upt Puskesmas Grabag

Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp159.715.000,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp49.289.300,00.

n. Upt Puskesmas Ngombol

Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp275.850.200,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp165.424.500,00.

o. Upt Puskesmas Semawung Daleman

Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp114.206.300,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp3.780.600,00.

p. Upt Puskesmas Loano

Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp116.030.000,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp5.604.300,00.

q. Upt Puskesmas Bruno

Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp295.182.200,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp184.756.500,00.

r. Upt Puskesmas Bragolan

Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp134.933.800,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp24.508.100,00.

s. Upt Puskesmas Kaligesing

Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp145.845.000,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp35.419.300,00.

t. Upt Puskesmas Karanggetas

Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp138.294.000,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp27.868.300,00.

u. Upt Puskesmas Dadirejo

Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp116.088.000,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp5.662.300,00.

v. Upt Puskesmas Bubutan

Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp113.100.000,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp2.674.300,00.

w. RSUD R.A.A Tjokronegoro

Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp26.978.535.100,00 namun pada Rancangan APBD tidak dianggarkan.

x. RSUD Dr. Tjitrowardojo

- 1) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 namun pada Rancangan APBD tidak dianggarkan; dan
- 2) Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp232.111.079.449,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp256.584.764.449,00.

y. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

- 1) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp1.715.000.000,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp4.720.000.000,00;
- 2) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Rehabilitasi Bendung Irigasi, pada RKPD dan PPAS tidak dianggarkan namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp700.000.000,00;
- 3) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Unit pengolahan setempat, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar

- Rp7.169.371.800,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp347.892.800,00;
- 4) Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, pada RKPD tidak dianggarkan, PPAS dianggarkan sebesar Rp450.000.000,00, namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp7.900.000.000,00;
 - 5) Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp20.287.572.600,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp21.287.572.600,00;
 - 6) Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan Jalan, pada RKPD dan PPAS tidak dianggarkan namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp8.900.000.000,00;
 - 7) Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan, pada RKPD dianggarkan sebesar Rp22.033.500.000,00, PPAS dianggarkan sebesar Rp30.943.561.164,00, namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp54.284.257.244,00; dan
 - 8) Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jembatan, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp1.005.700.000,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp1.505.700.000,00.
- z. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
- Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp348.080.000,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp568.256.000,00.
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota, pada RKPD dianggarkan sebesar Rp505.229.900,00, namun pada PPAS dan Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp758.764.300,00.
- bb. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
- 1) Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp4.645.015.200,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp65.015.200,00;
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp87.639.650,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp222.039.650,00;
 - 3) Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp192.000.000,00 namun pada Rancangan APBD tidak dianggarkan;

- 4) Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp908.320.000,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp240.000.000,00;
- 5) Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcum), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok), pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp361.120.000,00 namun pada Rancangan APBD tidak dianggarkan;
- 6) Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp124.999.000,00 namun pada Rancangan APBD tidak dianggarkan;
- 7) Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Sub Kegiatan Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp112.300.000,00 namun pada Rancangan APBD tidak dianggarkan;
- 8) Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp3.952.000.000,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp370.500.000,00;
- 9) Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp2.217.341.000,00 namun pada Rancangan APBD tidak dianggarkan;
- 10) Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp244.142.000,00 namun pada Rancangan APBD tidak dianggarkan;
- 11) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp286.000.000,00 namun pada Rancangan APBD tidak dianggarkan;
- 12) Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita), pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp2.134.800.000,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp3.913.800.000,00; dan

13) Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp1.846.465.400,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp67.465.400,00.

cc. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

- 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp5.953.028.300,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp6.059.127.900,00;
- 2) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp59.690.800,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp744.000.000,00; dan
- 3) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp274.350.200,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp850.000.000,00.

dd. Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp283.872.000,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp473.076.000,00; dan
- 2) Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp1.308.080.200,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp59.666.200,00.

ee. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

- 1) Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk, pada RKPD dianggarkan sebesar Rp872.394.000,00, namun pada PPAS dan Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp516.542.000,00; dan
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, pada RKPD dianggarkan sebesar Rp2.570.800,00, namun pada PPAS dan Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp646.409.816,00.

ff. Dinas Perhubungan

- 1) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp3.441.054.800,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp4.277.883.800,00; dan
- 2) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, pada RKPD dianggarkan sebesar Rp35.308.000,00, namun pada PPAS dan Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp335.308.000,00.

gg. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas, pada RKPD dianggarkan sebesar Rp175.143.000,00, namun pada PPAS dan Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp370.689.000,00.

hh. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan

- 1) Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan, pada RKPD tidak dianggarkan, PPAS dianggarkan sebesar Rp2.500.000.000,00, namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp5.424.705.740,00; dan
- 2) Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, pada RKPD dianggarkan sebesar Rp3.187.250.100,00, PPAS dianggarkan sebesar Rp3.387.250.100,00, namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp3.412.250.100,00.

ii. Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata

- 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp4.535.859.000,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp4.654.437.000,00; dan
- 2) Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp2.900.467.279,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp3.430.551.129,00.

jj. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

- 1) Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp753.002.000,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp3.002.000,00;
- 2) Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan, pada RKPD dianggarkan sebesar Rp180.693.600,00, namun pada PPAS dan Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp380.693.600,00;
- 3) Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan

Budaya Gemar Membaca, pada RKPD dan PPAS tidak dianggarkan namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp276.480.000,00;

- 4) Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp57.424.900,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp243.648.900,00; dan
- 5) Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis, pada RKPD dianggarkan sebesar Rp47.379.000,00, namun pada PPAS dan Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp441.409.000,00.

Konsistensi, kesesuaian dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Purworejo agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RPJMD

1. Kesesuaian program pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang APBD disampaikan sebagai berikut:
 - a. Jumlah program yang tercantum pada RPJMD sejumlah 137 program sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sejumlah 136 program.
 - b. Terdapat perbedaan alokasi anggaran, yang tercantum pada RPJMD dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang APBD Anggaran 2026, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	URAIAN	RPJMD (Rp)	RAPERDA APBD (Rp)
1.	Pendapatan	2.466.116.713.176	2.438.214.046.679
2.	Belanja	2.528.982.713.176	2.501.080.046.679
3.	Surplus/(Defisit)	(62.866.000.000)	(62.866.000.000)
4.	Pembiayaan Neto	62.866.000.000	62.866.000.000
5.	SILPA	0	0

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Purworejo agar tetap mengupayakan adanya kesesuaian dalam perencanaan dan penganggaran pada APBD mendasarkan pada RPJMD yang telah ditetapkan.

2. Berdasarkan BAB III Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 yang telah disampaikan, terdapat komitmen dukungan Kabupaten Purworejo terhadap 35 program Delegasi Provinsi Jawa Tengah yang diuraikan pada rencana aktivitas riil perangkat daerah dan nomenklatur program intervensi di APBD Kabupaten Purworejo. Namun demikian, kebijakan aktivitas pada Tahun 2026 belum dijelaskan pada dokumen RKPD, KUA/PPAS dan Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Purworejo Tahun

Anggaran 2026. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Purworejo agar memberikan penjelasan secara memadai terkait arah kebijakan dukungan 35 program delegasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dimaksud pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026

V. LAIN-LAIN

1. Hasil Pencermatan terhadap tata naskah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut:
 - a. Konsiderans menimbang agar diubah menjadi sebagai berikut:
 - 1) bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah harus disusun secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - 3) bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah maka diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;
 - 4) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 - b. Agar ditambahkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan pada dasar hukum “mengingat” sebagai berikut:
 - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 - d. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
 - e. Pasal 2 agar diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah... (...).
- (2) APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan Daerah.
- (3) Rincian APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:...
 - a. ...
 - b. ...

c. ...

Selanjutnya rujukan pasal, ayat dan huruf agar disesuaikan.

- e. Pasal 17 agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:

Pasal 17

Ketentuan mengenai APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

a. Lampiran I berisi...;

dst

... Lampiran ...berisi ...; dan

... Lampiran ...berisi ...;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Bupati Purworejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut:

- a. Konsiderans menimbang, frasa "Kabupaten Purworejo" sebelum frasa "Tahun Anggaran 2026" agar dihapus.
- b. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
- c. Pasal 2 agar diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar... (...).

(2) APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

(3) Rincian APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:...

- a. ...
- b. ...
- c. ...

Selanjutnya rujukan pasal, ayat dan huruf agar disesuaikan.

- d. Pasal 16 agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:

Pasal 16

Ketentuan mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

a. Lampiran I berisi...;

dst

i. Lampiran IX berisi...; dan

j. Lampiran X berisi...,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- e. Pasal 17 agar diawali dengan frasa "Ketentuan mengenai...".

3. Pemerintah Kabupaten Purworejo dapat melakukan penyesuaian substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Purworejo tentang Penjabaran APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026, dengan memperhatikan:

a. adanya perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai hasil evaluasi ini;

b. penyesuaian kembali terhadap akun pendapatan maupun belanja pada program/kegiatan/sub kegiatan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026, yang setelah dilakukan penelitian kembali dan/atau berdasarkan tindak lanjut hasil review memerlukan penyesuaian, mengacu ketentuan/petunjuk

- pelaksanaan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, termasuk di dalamnya belanja yang bersifat *earmark* dari Pemerintah;
- c. guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/ kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila ditemukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam proses perencanaan dan penganggaran yang tidak sesuai, maka agar dilakukan penyesuaian kembali pada Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
 4. Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026 agar memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta memedomani prinsip-prinsip Anti-Korupsi sebagaimana diamanatkan peraturan Perundang-undangan khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa, serta bebas dari kepentingan-kepentingan yang berujung pada tindakan merugikan keuangan daerah dengan memperhatikan tata cara pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan yang baik serta keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi. Hal tersebut diharapkan dapat meminimalkan risiko-risiko penyalahgunaan ataupun penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
 5. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Purworejo tentang Penjabaran APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Purworejo atau Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Hukum,



Sri Wahyuningsih, SH.

Pembina

NIP. 196910071994012001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).